

**PENERIMAAN PAJAK PERHOTELAN DALAM MENUNJANG
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MUNA
SULAWESI TENGGARA**

SUKMAWATI SALIHUN

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar
sukmawatisalihun699@gmail.com

ABSTRAK

Sukmawati Salihun. 2020. “Penerimaan Pajak Perhotelan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara.” Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Manan Sailan selaku Pembimbing I dan Hasnawi Haris Selaku Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) penerimaan pajak perhotelan dalam menunjang pendapatan asli daerah tahun 2016 - 2019 Kabupaten Muna. 2) Faktor yang berperan dalam penerimaan pajak hotel untuk menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Muna. Pendekatan penelitian adalah kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Fokus penelitian ini ialah penerimaan pajak perhotelan dan pendapatan asli daerah. Prosedur pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi berupa data target dan realisasi penerimaan kontribusi pajak hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) besarnya penerimaan pajak hotel dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna masih kecil yaitu dengan nilai rata-rata 0,10%. Secara implementatif belum dapat mencapai hasil yang optimal. Kurang optimalnya hasil pungutan pajak daerah di Kabupaten Muna hal tersebut terindikasi oleh realisasi penerimaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir kurang mencapai target yang direncanakan. Walaupun pajak daerah mengalami peningkatan tetapi belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. 2) Faktor yang berperan dalam pajak hotel dalam menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Muna yaitu pertama, jumlah hotel, hotel senantiasa dilandasi oleh peluang pasar yang ada di daerah dimana hotel akan didirikan atas permintaan pasar penginapan, semakin banyak wisatawan masuk ke daerah maka akan memperbesar potensi yang dapat dipungut dari kegiatan pada sektor perhotelan. kedua Jumlah wisatawan, jumlah wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya di Kabupaten Muna berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel, dengan meningkatnya jumlah wisatawan maka tingkat hunian kamar hotel juga meningkat. dan ketiga tingkat hunian kamar. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Muna maka akan memperbesar potensi hotel yang dapat dipungut dari kegiatan pada sektor perhotelan dan hotel yang senantiasa dilandasi oleh peluang pasar di daerah, dimana hotel yang akan didirikan atas permintaan pasar penginapan.

Kata Kunci : *penerimaan pajak hotel, pendapatan asli daerah.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki kebijakan dalam memajukan setiap daerah dalam pembenahan infrastruktur dan menaikkan taraf setiap daerah untuk mencapai otonomi daerah yang lebih baik. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah memberikan peluang kepada setiap daerah dalam mengelola pembangunan daerahnya, upaya memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah itu sendiri, khususnya pada setiap sumber-sumber pendapatan daerah yang dianggap strategis dan mempunyai peranan yang besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Melaksanakan pembangunan daerah, setiap daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit dimana dana tersebut dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan, Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat. Dana pembangunan daerah bersumber dari penerimaan daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.¹

Sumber-sumber pendapatan asli daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibagi atas beberapa jenis penerimaan daerah diantaranya adalah pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Sumber dari pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

menegaskan bahwa “Pajak Daerah, yang disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak ini akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak peneranga jalan, pajak bahan galian golongan C, pajak parkir pajak air tanah dan pemukiman, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.²

Pajak hotel merupakan salah satu dari jenis pajak kabupaten/kota yang kompeten dimana dapat memberikan sumbangan yang tinggi kepada daerah, ditambah semakin meningkatnya jumlah hotel khususnya yang ada di Kabuapten Muna sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah Kabuapten Muna dalam penerimaan pajak hotel.

Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh hotel yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel menegaskan bahwa, “tarif pajak hotel di tetapkan sebesar 10%”. Pajak hotel terdiri dari pendapatan kamar hotel yang terjual dan jasa hotel diluar dari aktivitas penginapan kamar hotel. Pendapatan pajak hotel dapat dilihat dari jumlah kamar yang terjual yaitu tingkat hunian kamar, selain itu adanya jumlah hotel dan jumlah obyek wisata.

¹ Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2006. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, Mardiasmo. 2009. *perpajakan*. Yogyakarta : Andi.

² Rustam, Akie Rusaktiva. 2014. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Kepemilikan NPWP Terhadap Penerimaan Pph Orang Pribadi Pengusaha. Jurnal Vol3No2.Hlm1*

Hotel adalah bangunan yang dipakai orang menginap dan dipungut bayaran. Hal ini tertulis dalam Pasal 1 ayat (21) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 (Lembar Negara Republik Indonesia nomor 5049) Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang menegaskan bahwa “Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup gubuk juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya serta kamar kos yang memiliki kamar lebih dari 10 (sepuluh).”

Pajak hotel merupakan pajak daerah kabupaten/kota yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara yang berkantor di jalan Gatot Subroto No.167 Raha.

Jumlah hotel Kabupaten Muna tahun 2019 berjumlah 19 unit. Jumlah tersebut dapat berubah sewaktu-waktu apabila hotel tidak beroperasi atau tutup usaha sementara. Hotel senantiasa dilandasi oleh peluang pasar yang ada di daerah. Hotel yang didirikan bergantung pada permintaan pasar penginapan. Semakin banyak wisatawan masuk ke daerah maka akan memperbesar potensi yang dapat dipungut dari kegiatan pada sektor perhotelan..

Pendapatan asli daerah Kabupaten Muna setiap tahunnya mengalami peningkatan terutama dari pungutan pajak hotel, hal ini dapat dilihat dari PAD Kabupaten Muna tahun 2016, dimana pajak hotel mengalami peningkatan sebesar Rp. 22,193,970.00 dari yang ditargetkan Rp. 22,510,795,00 sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 80,593,127.00 dari yang ditargetkan sebesar Rp.83,924,187.00.

Hasil observasi awal peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi dari segi apa saja yang mempengaruhi

penerimaan pajak hotel dalam menunjang pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Muna. Berdasarkan penjelasan latar belakang ini maka judul penelitian ini adalah “ **Penerimaan Pajak Perhotelan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna** ”

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Pajak

a. Pengertian Pajak

Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan umum³

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85) Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menegaskan bahwa “Pajak adalah kontribus wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo, sebagai berikut :

a. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran ini bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara

³ Adrian Sutedi. Hukum Pajak. Jakarta, Sinar Grafika. 2016. Hlm.2

baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintah maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.

b. Fungsi Mengatur

Fungsi mengatur untuk lapangan perekonomian, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produksi luar negeri.⁴

c. Pembagian Kewenangan Pusat Dan Daerah Tentang Pajak.

Pajak pusat dan pajak daerah adalah dua hal yang berbeda namun bagi Wajib Pajak sulit untuk membedakannya. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan ketentuan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara. Pajak daerah di kelolah oleh pemerintah daerah yang di pergunakan untuk keperluan daerah dengan kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

2. Konsep Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5049) Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menegaskan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan unruk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak daerah merupakan wewenang daerah yang

diatur di dalam undang-undang tentang pokok-pokok pemerintah daerah dan hasilnya di gunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah itu sendiri.

b. Kendala pemungutan pajak daerah.

Ada beberapa kendala dam pemungutan pajak sebagai berikut :

- 1) Pengawas peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah.
- 2) Pemberian perizinan, rekomendasi, dan pelaksanaan pelayanan umum yang kurang atau tidak sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
- 3) Belum dapat diterapkannya sistem *self assessment system* dalam pemungutan pajak daerah.⁵

3. Konsep Pajak Hotel

Pasal 1 ayat (20) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5049) Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menegaskan bahwa “Pajak Hotel adalah pajak pelayanan yang disediakan oleh pihak hotel”.

Peraturan daerah tentang pajak hotel memberikan kepastian hukum mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan cara pemungutan pajak. Sanksi dan hukuman bagi setiap pelanggar pajak juga diatur di dalam peraturan daerah tersebut. Akumulasi pemungutan pajak hotel merupakan pendapatan asli daerah yang sangat bermanfaat bagi membiayai pembangunan di daerah.¹²

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembar Negara Tahun 2011 Nomor 15 (Tambahan Lembar Negara Nomor 15)

Pasal 2

Pasal ini menegaskan bahwa :

“dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran.”

Pasal 3

⁴ Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta. C.V Andi offset. 2000. Hlm. 9

⁵ Gusfahmi. *Pajak menurut syariah*. Jakarta. Rajawali Pers. 2011. Hlm.27

Pasal ini menegaskan bahwa :

- 1) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- 2) Jasa penunjang sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksi mill, teleks internet, foto copy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas jenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- 3) Tidak termasuk objek pajak hotel sbagai mana yang dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a) Jasa tempat tinggal asrama yang disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
 - b) Jasa sewa apartemen, kondominum dan sejenisnya.
 - c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
 - d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis.
 - e) Jasa biro perjalanan atau pelayanan wisata yang disediakan oleh hotel yang dimanfaatkan oleh kepentingan umum.

Pasal 4

Pasal ini menegaskan bahwa :

- 1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- 2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Pasal 5

Pasal ini menegaskan bahwa :

“dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau seharusnya dibayarkan kepada hotel.”

Pasal 6

Pasal ini menegaskan bahwa :

- a) Tarif Pajak Hotel ditetapkan 10% (sepuluh persen).
- b) Tarif rumah kos diatas 10 (sepulu) kamar ditetapkan sebesar 5%.

Kesimpulannya bahwa pajak hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan hotel. Obyek pajaknya adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran hotel. Setiap fasilitas penginapan atau tempat tinggal dalam waktu sementara atau jangka waktu pendek. Subjek pajak dari pajak hotel orang pribadi atau badan usaha yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel dan tarif pajak hotel ditetapkan oleh peraturan daerah.

4. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Pengertian pendapatan asli daerah

Halim berpendapat bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD yang sah lainnya. Pengertian pendapatan asli daerah dapat di katakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya sebagai mana yang dimaksud di dalam Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 2004 (lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438) tentang Perimbangan Keuang Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerinta Daerah⁶

- b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 (lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438) Tentang Perimbangan Keuang Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

⁶ Ahmad Yani. *Hubungan Keuangan Anatar Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2013 Hlml.51

daerah, pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pajak, pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Provisnsi dan Pajak Kabupaten/Kota, masing-masing pajak tersebut memiliki jenisnya masing-masing yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten/kota terdiri dari :

a) Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah bahan usaha tertentu yang jumlah ruangan/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel.

b) Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak rstoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran

c) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan hiburan yang dimiliki biaya atau ada pemungutan biaya didalamnya kisaran tarif untuk pajak hiburan adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.

d) Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat atau media yang bentuknya dan coraknya dirancang untuk tujuan komersil agar menarik perhatian umum. Tarif untuk pajak reklame adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

e) Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungutkan atas pelayanan listrik, baik yang disediakan sendiri maupun sumber

lain. Tarif pajak ini berbeda-beda tergantung dari penggunaannya.

f) Pajak mineral bukan logam dan batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan ini merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung granis dan lain sebagainya. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25% dan tarif untuk batuan sebesar 20%.

g) Pajak parkir

Pajak paker merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat paker diluar badan jalan, baik yang terkait dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan. Lahan paker yang dikenakan pajak adalah lahan yang kapasitasnya bias menampung lebih dari 10kendaraan roda 4 dan 20 roda 2 tarif yang dikenakan 20%.

h) Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersial. Tarif yang dikenakan adalah 20%.

i) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung wallet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung wallet. Tarif yang dikenakan sebesar 10%.

j) Pajak Bumi Dan Bangunan Pesesaan dan Perkotaan

Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan.

k) Pajak Perolehan Ha Katas Tanah Dan/Atau Bangunan

Pajak ini merupakan pajak atas perolehan tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu. Tarif dari pajak ini sebesar 5%⁷

2) Retribusi Daerah

⁷ Rini Maulidia. "pajak daerah: pengertian pajak daerah, ciri-ciri, jenis, dan tarifnya. <https://www.online-pajak.com/tentangpajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>. (diakses pada 05 Agustus 2020, pukul 02:10)

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi yang terdiri dari :

- a) **Retribusi Jasa Umum**
Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b) **Retribusi Jasa Usaha**
Jasa usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan /memanfaatkan dengan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan oleh pihak swasta.
- c) **Retribusi Jasa Perizinan**
Retribusi jasa perizinan tertentu merupakan pemungutan atas perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksud untuk mengatur dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis penerimaan ini dirinci menurut objek pendapatan yang meliputi :
 - 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
 - 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN.
 - 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
 - 4) Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik PEMDA.

Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pasal 6 ayat (2) Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 (lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438) Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah, menegaskan bahwa, lain-lain PAD yang sah meliputi :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran atau cicilan.
- b) Jasa giro.
- c) Pendapatan bunga.
- d) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.
- e) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif yakni berupa kalimat-kalimat terkait dengan penerimaan pajak hotel dalam menunjang pendapatan asli daerah tahun 2016 -2019 Kabupaten Muna dan faktor yang berperan dalam penerimaan pajak hotel untuk menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Muna.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus yaitu data-data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah berupa data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna selama empat tahun, yakni tahun 2016-2019.

2. Lokasi Penelitian

Menetapkan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka

mempertanggung jawabkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini lokasi yang peneliti pilih adalah di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara Jalan Gatot Subroto No. 167 Telpn (0403) 22544

Kabupaten Muna. Alasan peneliti tertarik untuk meneliti ini adalah untuk mengetahui lebih dalam lagi dari segi apa saja yang berperan dalam penerimaan pajak hotel dalam menunjang pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Muna.

3. Deskriptisi Fokus

- a. Pajak hotel yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian dalam menunjang penerimaan pendapatan asli daerah.
- b. Penerimaan keuangan daerah yang diperoleh melalui pendapatan asli daerah yang dimaafatkan untuk pembangunan daerah yang diatur dengan perundang-undangan dan diukur dalam satuan rupiah.

4. Tahap-tahap Kegiatan Penelitian.

Ada 3 (tiga) tahap dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan penulisan laporan penelitian.

- 1) Tahap perencanaan
- 2) Tahap pelaksanaan
- 3) Tahap penulisan

5. Jenis Data Dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer mengenai penerimaan pajak hotel oleh pihak DISPENDA dalam menunjang pendapatan asli daerah. Sedangkan data sekunder berupa laporan serta data mengenai pajak hotel yang diperoleh di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara.

b. Sumber data

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui informan kunci

dalam hal ini bidang pajak dan BPHTB terkait dengan gambaran penerimaan pajak perhotelan dalam menunjang pendapatan asli daerah di Kabupaten Muna. Sumber data sekunder dalam penelitian ini di peroleh melalui hasil laporan dan data penerimaan pajak perhotelan di Kabupaten Muna.

6. Instrument Penelitian

Dalam penelitian ini instrument penelitian utama yaitu peneliti itu sendiri. Peneliti adalah instrumen inti dalam penelitian. Alasan mengapa peneliti dijadikan sebagai instrument utama karena peneliti yang melakukan observasi, membuat catatan, dan melakukan penelitian.

7. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan yakni pengamatan tentang penerimaan pajak perhotelan dalam menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Muna yang di fokuskan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara pada tanggal 11 maret 2020.

b. Wawancara

Wawancara merupakan wawancara yang dilakukan secara langsung dengan mengumpulkan data dan informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan narasumber, dengan maksud mendapatkan informasi tentang pajak hotel dalam menunjang PAD Kabupaten Muna dan faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan yang bersifat digital dan non digital berupa tangkapan layar, dapat bersifat formal dan non formal.

9. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisi data deskriptif adalah tehnik analisis yang

digunakan dalam menganalisis data dengan membuat gambaran dari data yang dikumpulkan tanpa membuat generalisasi dari hasil penelitian, sehingga dapat menguraikan dan menjelaskan tentang penerimaan pajak hotel dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui penerimaan pajak hotel dalam menunjang pendapatan asli daerah dengan menggunakan rasio kontribusi yang dikemukakan oleh Arikunto yang dikutip oleh Siregar yaitu

$$P_n = \frac{Q_x}{Q_y} \times 100 \%$$

Keterangan :

P= Kontribusi penerimaan Pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah

n= Tahun (periode) tertentu

Qx= Penerimaan pajak perhotelan

Qy= Penerimaan pendapatan asli daerah

Kontribusi pajak hotel dan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disusun ukuran sebagai berikut:

80% - 100% : Besar Sekali

60% - 79% : Besar

40% - 59% : Cukup besar

20% - 39% : Cukup

0% - 19% : Kecil

HASIL PENELITIAN

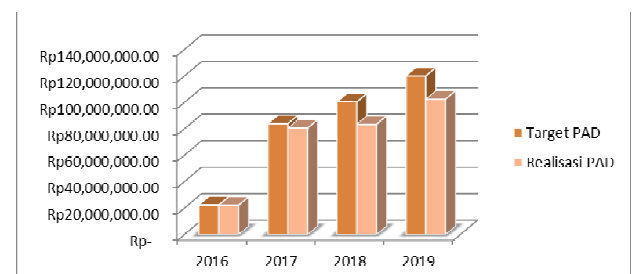
Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya dan sesuai dengan judulnya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerimaan pajak perhotelan dalam menunjang pendapatan asli daerah.

Dari observasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Muna tahun 2016-2019 mengalami peningkatan tiap tahunnya dari tahun 2016-2019. Pada tahun 2016 total penerimaan PAD sebesar Rp.22.193.970,00 dengan total target pendapatan asli daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

sebesar Rp.22.510.795,00. Pada tahun 2017 meningkat dengan selisih sebesar Rp.58.399.157,00 dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2018-2019 total pendapatan asli daerah meningkat yang diikuti dengan peningkatan jumlah target untuk setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 mencapai Rp. 102.504.600,00 dengan target sebesar Rp.120.068.600,00. Total pendapatan asli daerah tiap tahunnya bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Gambar 4.1

Grafik Target dan Realisasi PAD di Kabupaten Muna



PEMBAHASAN

1. Penerimaan Pajak Perhotelan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2019 Kabupaten Muna

Hasil analisis yang telah di paparkan dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa penerimaan PAD di Kabupaten Muna dari tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi. Pada table 4.3 presentase pajak hotel dari tahun 2016-2019 terhadap pendapatan asli daerah Kabuapten Muna masih tergolong kecil. Pada tahun 2016 presentase penerimaan pajak hotel sebesar 0,24%, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,18%, sehingga menjadi 0,06%, dan pada tahun 2018 merupakan presentase penerimaan yang meningkat dari tahun sebelumnya dengan selisi 0,06%, sehingga menjadi 0,12%, Pada tahun 2019 presentase kontribusi kembali menurun sebesar 0,02%, sehingga menjadi 0,10% hal ini sesuai pendapat Arikunto oleh siregar yang menyatakan bahwa ukuran persentase penerimaan sebesar 0%-19% masuk kategori kecil.

Secara implementatif belum dapat mencapai hasil yang optimal. Kurang optimalnya hasil pungutan pajak daerah di Kabupaten Muna hal tersebut terindikasi oleh realisasi penerimaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir kurang mencapai target yang direncanakan. Walaupun pajak daerah mengalami peningkatan tetapi belum memberikan penerimaan yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara.

2. Faktor Penerimaan Pajak Perhotelan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna

Meningkatnya penerimaan pajak hotel di Kabupaten Muna dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang berperan dalam penerimaan pajak hotel adalah:

a) Jumlah Hotel

Hotel senantiasa dilandasi oleh peluang pasar yang ada di daerah dimana hotel akan didirikan atas permintaan pasar penginapan. Semakin banyak wisatawan masuk ke daerah maka akan memperbesar potensi yang dapat dipungut dari kegiatan pada sektor perhotelan. Bertambahnya jumlah hotel yang ada di Kabupaten Muna salah satunya mempengaruhi Penetapan target untuk pajak hotel oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.

b) Jumlah Wisatawan

Jumlah wisatawan yang berkunjung pada objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Muna semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini seiring banyaknya objek wisata yang semakin berkembang pesat. Pengeluaran wisatawan selama dalam perjalanan wisata merupakan sumber penerimaan pajak daerah seperti wisatawan yang menginap di hotel akan meningkatkan penerimaan hotel yang secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak hotel. Jumlah wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya di Kabupaten Muna berpengaruh

terhadap penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel, dengan meningkatnya jumlah wisatawan maka tingkat hunian kamar hotel juga meningkat, demikian tercapainya target pajak daerah serta meningkatnya realisasi pajak daerah khususnya pajak hotel, dikarenakan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Muna karena tertarik dengan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Muna.

c) Tingkat Hunian kamar

Tingkat hunian kamar adalah kamar-kamar yang terisi yang disewakan kepada tamu yang dibandingkan dengan jumlah seluruh kamar yang tersedia, yang dihitung dalam jangka waktu tahunan. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Muna maka akan memperbesar potensi hotel yang dapat dipungut dari kegiatan pada sektor perhotelan dan hotel yang senantiasa dilandasi oleh peluang pasar di daerah, dimana hotel yang akan didirikan atas permintaan pasar penginapan. Tarif pajak hotel yang ditetapkan 10% sesuai dengan isi Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel.

KESIMPULAN

1. Pencapaian presentase penerimaan pajak hotel dari tahun 2016-2019 memberi nilai rata-rata sebesar 0,10% Secara implementatif belum dapat mencapai hasil yang optimal. Hal ini sesuai pendapat Arikunto oleh Siregar yang menyatakan bahwa, ukuran persentase penerimaan sebesar 0%-19% masuk kategori kecil.
2. Kabupaten Muna memiliki tingkat penerimaan pajak hotel yang meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya penerimaan pajak hotel di Kabupaten Muna dipengaruhi oleh
 - a. Jumlah hotel
 - b. Jumlah wisatawan
 - c. Tingkat hunian kamar

SARAN

1. Untuk meningkatkan penerimaan pemerintah daerah disarankan untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang bisa menciptakan penerimaan yang lebih meningkat lagi sehingga bisa mendorong peningkatan PAD Kabupaten Muna
2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel pemerintah daerah disarankan mengadakan kegiatan tertentu yang bisa menarik perhatian banyak orang/wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Muna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aziz, Azhari Samudra. 2015.

Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak dan retribusi.
jakarta: Rajawali pers.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna, 2005, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Muna Tahun 2005-2010*, Muna.

Boediono, B. 2000. *perpajakan Indonesia (teori perpajakan, kebijakan perpajakan, pajak luar negeri.* Jakarta: Diadit Media.

Dinas Pariwisata Kabupaten Muna, 2008, *Potensi Pariwisata Kabupaten Muna*, Muna.

Dwiarto utomo dan yulita setiawanta dan agungyulianto. 2011. *Perpajakan aplikasi & terapannya.* Yogyakarta: C.V andi offset.

Gusfahmi. 2011. *Pajak menurut syariah.* Jakarta: rajawali pers.

Haula, E., & Slamet, I.E 2014. *Pengantar Ilmu Pajak (Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia).* Jakarta: Rajagrafindo Persada

Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2006. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Indonesia.* Malang: Bayumedia Publishing.
Mardiasmo. 2009. *perpajakan.* Yogyakarta : ANDI

Mardiasmo, M.A. 2002. *Perpajakan revisi tahun 2002.* bulaksumur: Andi Jogjakarta.

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak.* Jakarta: Erlangga.

Rustam, Akie Rusaktiva. 2014. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Kepemilikan.*

Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan.* Bandung: Refika Aditama.

Sutedi, Adrian. 2016. *Hukum Pajak.* Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. 2011 *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta

Tim penyusun FIS UNM, 2015, *Pedoman Penulisan Skripsi,* Makassar: CV. Berkah Utami

Yani, Ahmad.. 2013. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerinta Daerah Di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers.

Zuriah, Nurul. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori- Aplikasi.* Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah. (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Perbup Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

Perda Kab. Muna Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. Lembar Daerah Kabupaten Muna Tahun 2011, Nomor : 15.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Jurnal

NPWP Terhadap Penerimaan Pph Orang Pribadi Pengusaha. Jurnal Vol3No2.Hlm18
http://www.slideshare.net/Uofa_Unsada/2011420028-achadde

Internet

Maulidia Rini. “pajak daerah: pengertian pajak daerah, ciri-ciri, jenis, dan tarifnya”. 5 Agustus 2020.
<https://www.online-pajak.com/tentangpajakpribadi/sistem-pemungutan-pajak>.

